

Book Chapter_Lingkungan

by Mukhlis Mukhlis

Submission date: 04-Jun-2021 08:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1600371143

File name: Lingkungan_Book_Chapter_2.pdf (372.1K)

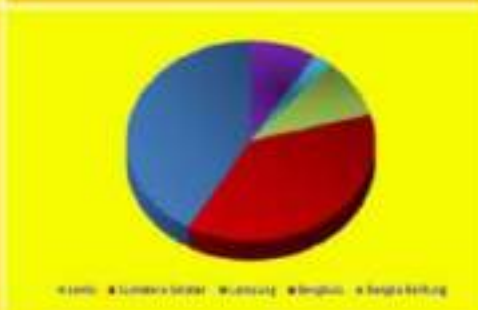
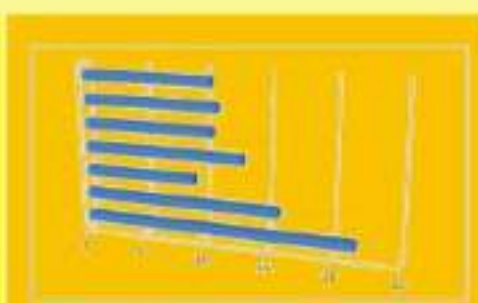
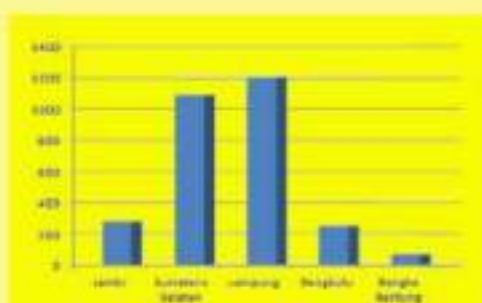
Word count: 5182

Character count: 35184



Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS



**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

**Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Tim Penulis



**INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Tim Penulis

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2021
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting cover: Anggita Feisabella Rizanti
Setting & Lay Out Isi : Devi
Cetakan Pertama, Januari 2021
xiv + 252 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau
dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-913-8

KATA SAMBUTAN

Syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, dan karunia-Nya penyusunan buku yang berjudul “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” dapat terselesaikan. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menyambut dengan baik dan penuh rasa syukur atas terbitnya buku ini. Adanya buku ini merupakan suatu kehormatan dan



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.,
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya

kebanggaan bagi saya karena melalui buku ini Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dapat diperkenalkan. Buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” merupakan hal penting, karena buku ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pengukuran dalam menganalisis berbagai indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah dan dilengkapi dengan berbagai tinjauan Pustaka baik teoritis maupun empiris. Pada kesempatan ini, saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun materil.

Akhir kata, semoga buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Januari 2021

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.

KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhitungkan karena pembangunan ekonomi mengindikasikan keberhasilan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, yang mana kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dapat menggunakan otonomi daerah sebagai cara terbaik, karena kemandirian dalam melaksanakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama menyajikan berbagai pengukuran yang digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Penyajiannya secara ringkas meliputi konsep dan definisi dasar, formulasi dan contoh perhitungan yang dilengkapi dengan contoh data dan interpretasinya. Pada bagian kedua, buku ini menyajikan berbagai tinjauan literatur baik secara teoritis maupun empiris yaitu lingkungan dan pembangunan, upah tenaga kerja, aglomerasi industri, efisiensi perbankan, perkembangan inklusi keuangan, struktur ekonomi serta keuangan desa.

Buku ini terdiri dari 8 bab, bab 1 membahas mengenai analisis ekonomi daerah yang menyajikan informasi tentang dasar-dasar ekonomi wilayah serta perhitungan PDRB juga produktivitas ekonomi. Pada bab 2 membahas mengenai analisis keuangan daerah yang meliputi konsep keuangan daerah, komposisi APBD serta

penilaian kinerja keuangan daerah. Bab 3 membahas mengenai lingkungan dan pembangunan, yang meliputi hubungan antara lingkungan dan pembangunan, pembangunan berkelanjutan serta kebijakan yang digunakan untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bab 4 membahas mengenai determinan dan struktur upah pekerja.

Pada bab 5 membahas mengenai potensi aglomerasi industri kecil di Sumatera Selatan baik ditinjau dari skala ekonomi, biaya bahan baku dan pemasaran serta upah pekerja. Bab 6 menyajikan informasi mengenai efisiensi perbankan. Bab 7 membahas mengenai perkembangan inklusi keuangan Sumatera Selatan. Bab 8 membahas mengenai dana desa serta kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan perkembangan wilayah.

Buku ini dikemas sedemikian rupa agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu proses penyusunan buku ini, yang telah bersedia menyumbangkan ide, pikiran, waktu dan tenaga sehingga pada akhirnya buku ini dapat selesai dan diterbitkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I Analisis Ekonomi Daerah	
Imelda, M. Deassy Apriani, Anggita Feisabella Rizanti, Mega Debiyanti.....	1
BAB II Analisis Keuangan Daerah	
Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini	43
BAB III Lingkungan dan Pembangunan	
Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto, Ichsan Hamidi	79
BAB IV Upah Pekerja: Determinan dan Struktur	
Yunisvita	103
BAB V Aglomerasi Industri: Telaah Prospek Untuk Industri Kecil di Sumatera Selatan	
Mukhlis, Bernadette Robiani, Dirta Pratama Atiyatna, Hamira	151
BAB VI Efisiensi Perbankan	
Subel	181
BAB VII Perkembangan Inklusi Keuangan Sumatera Selatan	
Sri Andaiyani dan Ariodillah Hidayat	217
BAB VIII Dana Desa: Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah	
Sukanto, Azwardi, Wika Indriyani	227

BAB III

LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

Oleh:

Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto, Ichsan Hamidi

1. Pendahuluan

Memahami hubungan antara Lingkungan dan Pembangunan tidak cukup hanya melihat data, informasi dan pengetahuan, tetapi juga harus dapat menjelaskan hubungan dan konsekuensi secara mendalam untuk menemukan solusi kebijakan dan kemungkinan program kegiatan untuk mendorong pembangunan. Secara umum, dalam literatur ekonomi pembangunan pembangunan terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Indikator dasar yang digunakan untuk pembangunan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang didefinisikan sebagai ukuran agregat produksi yang sama dengan jumlah nilai bruto yang ditambahkan dari semua sektor dan unit kelembagaan yang terlibat dalam produksi tersebut. Sementara itu, lingkungan juga dapat dipahami melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, hutan, minyak bumi, batubara dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan. Persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan lingkungan adalah bagaimana mengelola dan mengalokasikan SDA tersebut agar dapat

menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan tersebut.

Dalam literatur ilmu ekonomi SDA, untuk memahami konsep sumber daya alam ada dua hal penting yang perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan pengertian antara sumber daya alam dan barang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang masih terdapat dalam ataupun diluar bumi yang masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya kebutuhan manusia. Sementara barang sumber daya alam adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari tempat tersedianya dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor produksi lain untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pandangan Rees (1990) dalam bukunya menjelaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai barang sumber daya alam harus memiliki dua kriteria, yaitu: (1) harus ada pengetahuan, teknologi atau ketrampilan untuk memanfaatkannya; dan (2) harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya alam tersebut. Apabila kedua kriteria tersebut tidak dimiliki, maka sesuatu tersebut disebut dengan barang netral. Sebagai contoh, tambang emas yang terkandung dalam bumi, apabila belum memiliki pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkannya dan tidak ada permintaan, maka tambang emas tersebut masih dalam kriteria barang netral. Namun pada saat ada permintaan dan teknologi tersedia, maka menjadi barang sumber daya alam.

Pengelolaan SDA merupakan suatu intervensi publik yang sistematis dalam jangka Panjang, sehingga dalam pengalokasian dan pemanfaatan SDA juga harus dapat dikontrol oleh pemerintah dan

mekanisme pasar, hal ini dimaksudkan supaya kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial (kegagalan pasar) yang akan terjadi dapat diminimalisir. Sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas dan mengalami kerusakan merupakan suatu kendala bagi berlangsungnya pembangunan. Untuk menangani persoalan tersebut tentu harus mendapatkan perhatian yang serius bagi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia internasional, karena apabila tidak dilakukan dengan serius justru akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu sangatlah penting melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam agar dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati lebih hati-hati dan sangat diperlukan bagi pembangunan.

Kebijakan pembangunan dan aspek lingkungan seringkali tidak sejalan, hal ini bertolak belakang dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konferensi mengenai Lingkungan dan Mahluk hidup di Stockholm pada 1972. Pada pertemuan itulah untuk pertama kalinya secara luas seluruh perwakilan dari berbagai negara di dunia menekankan perlunya memperhitungkan aspek lingkungan pada program-program pembangunan yang selama ini dijalankan. Pada pertemuan menghasilkan pemikiran yang pro-kontra antara negara maju dan berkembang, terutama bagi negara-negara berkembang yang beranggapan bahwa isu lingkungan ini merupakan akal-akalan negara maju untuk menghindar dari tuntutan agar negara maju membantu negara berkembang dengan menyumbang sebesar 0,7 persen dari

Produk Domestik Bruto (PDB) negara maju untuk negara berkembang (Salim, 2010).

Masalah lingkungan di dalam ranah ekonomi dapat ditinjau melalui model aliran melingkar atau model keseimbangan material yang merupakan konsep dasar interaksi antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Selain itu, teori transisi lingkungan perkotaan juga dapat menjadi dasar untuk mengungkapkan hubungan antara lingkungan dan pembangunan di tingkat perkotaan, teori ini menekankan pada interaksi rumah tangga melalui sektor konsumsi dan produksi terhadap lingkungan, pada pada gilirannya menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan yang lebih tinggi. Selanjutnya masalah lingkungan juga dapat ditinjau dari teori eksternalitas yang secara khusus memperhitungkan dengan tepat konsekuensi lingkungan dari sebuah kegiatan ekonomi. Titik awal untuk mengembangkan landasan kesejahteraan secara teoritis dalam ekonomi lingkungan adalah dengan memahami definisi kriteria normatif yang dapat digunakan untuk menilai keinginan dari hasil ekonomi yang berbeda. Kriteria yang dapat gunakan adalah optimalitas Pareto, yang memiliki keutamaan dan kelemahan sebagai dasar normatif untuk rekomendasi kebijakan.

Tantangan kedepan bagaimana kebijakan pembangunan dalam memanfaatkan lingkungan dan mengelolah sumber daya alam tersebut. Dalam memahami hal tersebut titik awalnya adalah apakah aktivitas pembangunan memiliki pengaruh langsung terhadap lingkungan. Fungsi pertanyaan tersebut adalah untuk menganalogikan jenis masalah yang dipertimbangkan dalam ekonomi lingkungan dan

petunjuk pada aspek studi positif dan normatif. Dari sudut pandang positif yakni memahami bagaimana struktur kelembagaan yang ada dapat menyebabkan para pelaku ekonomi yang berkepentingan secara mandiri untuk melakukan tindakan yang memiliki konsekuensi negatif bagi pihak lain. Sementara, pendapat dari perspektif normatif menyarankan adanya intervensi kebijakan dari pemerintah yang dapat membantu mengurangi konsekuensi tersebut.

2. Hubungan antara Lingkungan dan Pembangunan

Interaksi ini dapat dicirikan sebagai salah satu saling ketergantungan. Sebagaimana pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa kondisi lingkungan yang baik, demikian pula kualitas lingkungan tidak dapat dipertahankan di wilayah yang dihuni atau dieksploitasi secara intensif tanpa pembangunan berkelanjutan. Apabila memandang pembangunan secara sempit hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, maka kualitas lingkungan secara umum tidak terlalu menjadi masalah karena kelimpahan, kualitas dan aksesibilitas sumber daya alam untuk bahan baku dan energi sebagai pusat perekonomian. Jika kita memahami pembangunan secara lebih luas, misalnya dalam arti pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan dan kondisi berkelanjutan akan menjadi salah satu prioritas utama. Dalam hal ini, pelestarian kelestarian lingkungan jangka panjang atau pada akhirnya perbaikan kondisinya (dalam kasus kerusakan masa lalu) akan menjadi pusat perhatian.

Kondisi atau kualitas lingkungan setelah atau selama pelaksanaan program pembangunan dapat memberikan dampak

terhadap lingkungan. Pelaksanaan program atau proyek pembangunan dapat berdampak negatif dan positif terhadap lingkungan. Adapun contoh dari dampak tersebut dan pengaruhnya adalah:

- (1). Dampak negatif dari program pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan air besar, kota; penambangan sumber daya alam dari bahan mentah dan energi dan lain-lain. Program pembangunan tersebut dapat memberikan pengaruh seperti fragmentasi habitat alami; hilangnya tanah subur; deforestasi dan degradasi tanah; pencemaran lingkungan; perubahan iklim lokal dan lain-lain.
- (2). Dampak positif dari program pembangunan bendungan air yang lebih kecil; penerapan teknologi ramah lingkungan dan lain-lain. Pengaruh dari implementasi program tersebut dapat meningkatkan keanekaragaman hayati; pengayaan lanskap dengan fitur budaya; eksploitasi lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Lingkungan merupakan salah satu determinan penting yang mempengaruhi kemungkinan pembangunan. Diketahui secara empiris bahwa berbagai strategi pembangunan harus diterapkan di perkotaan, industri, dan pedesaan. Pendekatan pembangunan yang berbeda harus ditentukan sesuai dengan kondisi geografi wilayah seperti di daerah daratan, pesisir, pegunungan, dan dataran rendah. Jenis ekosistem dan iklim wilayah juga menjadi faktor penting dalam menentukan program pembangunan. Selain itu, faktor yang juga paling menentukan kebijakan dan program pembangunan adalah:

- (1). Zona iklim (tropis, subtropis, zona sedang);
- (2). Faktor fisik-geografi dasar (misalnya ketinggian di atas permukaan laut, curah hujan, suhu);
- (3). Kualitas lingkungan (misalnya tingkat polusi, kepadatan penduduk, perluasan area yang gundul, tingkat degradasi tanah dan penggurunan);
- (4). Kualitas dan kesuburan tanah, kualitas dan kuantitas sumber daya bahan baku dan energi, aksesibilitas sumber daya air minum berkelanjutan, dan sejenisnya.

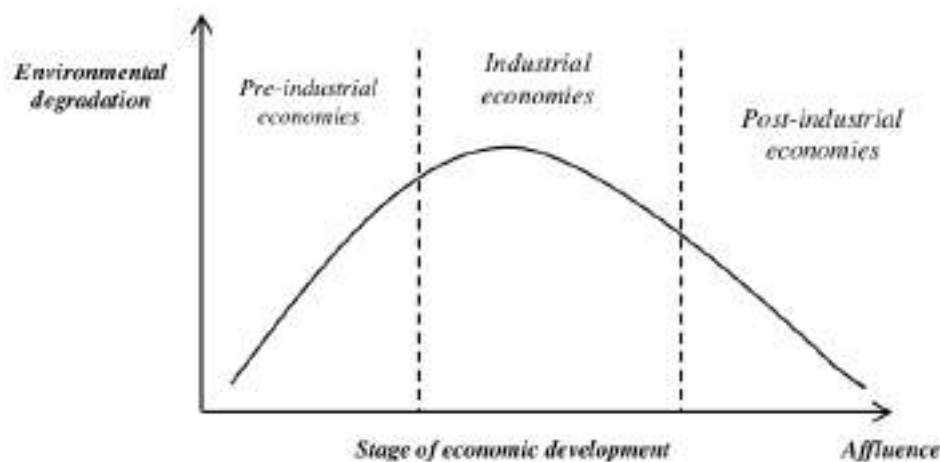
Pembangunan ekonomi dapat diikuti juga oleh perkembangan industrialisasi, infrastruktur, dan aktivitas manusia sangat erat kaitannya dengan penurunan kualitas lingkungan yang sekaligus dapat merubah bentuk fisik atau kawasan suatu wilayah (Misra, 2014 dan Patz *et al.*, 2003). Aktivitas tersebut secara langsung dapat meningkatkan kebutuhan energi. Sementara aktivitas manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (kesejahteraan) seringkali mengabaikan dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Bahkan lebih jauh dapat mengakibatkan terjadinya deforestasi atau kehilangan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta terjadinya erosi tanah. Pada saat fungsi komponen-komponen lingkungan tersebut hilang, maka mengakibatkan terjadinya bencana alam dan tingginya tingkat polusi pada suatu kawasan. Beberapa studi terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Alam (2010); Sorrell (2010); Guo & Ma (2008); dan Basiago (1999) menjelaskan bahwa antara aktivitas pembangunan dan lingkungan terdapat fenomena

trade-off karena pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa kondisi lingkungan yang baik, demikian pula kualitas lingkungan tidak dapat dipertahankan di wilayah yang dihuni atau dieksploitasi secara intensif tanpa pembangunan.

Fenomena tersebut dapat dianalogikan ketika pembangunan ekonomi suatu negara masih belum berkembang, maka perhatian negara tersebut tertuju pada bagaimana meningkatkan pembangunan negara tersebut, baik melalui produksi, investasi, perdagangan internasional yang akan merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan lingkungan. Akibat dari pembangunan ekonomi tersebut juga diikuti oleh peningkatan indikator polusi sampai pada titik tertentu dan kemudian menurun kembali selama pembangunan yang terus berjalan. Konsep ini juga dikembangkan atas dasar permintaan akan kualitas lingkungan pada negara-negara maju melalui peningkatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang diikuti juga pengawasan sosial dan regulasi pemerintah sehingga masyarakat akan lebih sejahtera (Mason & Swanson, 2002).

Pada Gambar 1 mengilustrasikan bahwa pada tahap pertama, pembangunan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan degradasi lingkungan yang disebut sebagai *pre-industrial economies*, tahap kedua dikenal sebagai *industrial economies*, dan tahap ketiga, dikenal sebagai *post-industrial economics (service economy)*. Industrialisasi berawal dari industri kecil dan kemudian bergerak ke industri berat. Pergerakan ini diasumsikan dapat meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, yang pada akhirnya menyebabkan

penurunan kualitas lingkungan (degradasi lingkungan). Setelah itu industrialisasi dapat memperluas perannya pada pembentukan produk nasional domestik yang semakin stabil. Adanya investasi asing juga telah mendorong terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam meningkatkan perekonomian suatu negara secara langsung akan menyebabkan terjadinya peningkatan polusi di negara tersebut (Panayotou, 2003).



Gambar 3.1 Hubungan antara Degradasi Lingkungan dan Pembangunan

Sumber: Panayotou (2003)

Pada tahap berikutnya transformasi ekonomi terjadi berupa pergerakan dari sektor industri ke sektor jasa. Pergerakan ini diikuti oleh penurunan polusi yang sejalan dengan peningkatan pendapatan. Selain itu peningkatan permintaan kualitas lingkungan berjalan seiring

dengan peningkatan pendapatan. Pada gilirannya peningkatan pendapatan dapat diikuti oleh peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar kerugian lingkungan (*external cost*) yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi. Pendapat lain dari Andreoni & Levinson (2001) yang menyatakan bahwa pada tahap ini juga ditandai oleh timbulnya kemauan masyarakat untuk mengorbankan konsumsi barang lainnya demi terlindunginya lingkungan.

Selain itu, Panayotou (2003) juga menggambarkan adanya dampak skala pada polusi, yang mengendalikan dua efek lainnya, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pendapatan secara monoton karena semakin besar skala aktivitas ekonomi per unit di daerah akan menyebabkan semakin tinggi tingkat pencemaran, dan diasumsikan semua kegiatan lainnya sama. Sementara itu, terjadinya perubahan struktural dengan mengubah komposisi aktivitas ekonomi terhadap sektor-sektor yang memiliki intensitas polusi lebih tinggi juga dapat mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan. Lebih jauh, Pindyck (2013) menjelaskan bahwa penurunan kualitas lingkungan dan lainnya dapat mengakibatkan pasar yang tidak efisien karena menghambat produksi, menambah biaya marjinal dan membuat ketidakefisienan sosial dalam pasar, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (Eidelwein *et al.*, 2018)

3. Pembangunan Berkelanjutan

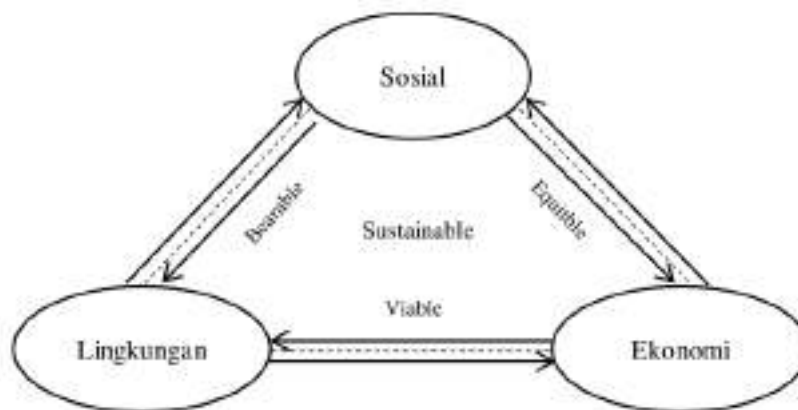
Pembangunan berkelanjutan diperkenalkan sebagai prioritas global dalam apa yang disebut "KTT Bumi", di Rio de Janeiro, pada tahun 1992. Kemudian, pada tahun 2002 dan 2012 sebagian besar negara di

dunia memperbarui komitmen mereka untuk mencapai keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar yaitu: (1) pembangunan ekonomi; (2) pembangunan sosial; dan (3) perlindungan lingkungan (United Nations, 2015). Konsep pembangunan berkelanjutan juga menjelaskan bahwa penduduk di suatu wilayah dapat bertindak sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Untuk memahami hubungan antara penduduk dengan lingkungan dapat diawali dari pertumbuhan penduduk, karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk resiko kerusakan lingkungan semakin besar, hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk, karena pada dasarnya manusia selalu memanfaatkan SDA. Dampak terhadap lingkungan bisa positif, dan negatif, namun faktanya dampak negatif lebih dominan karena pemanfaatan SDA cenderung tidak bijaksana sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui partisipasi semua pihak. Secara umum pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya), yang mempunyai prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa yang akan datang (Brundtland, 1987). Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara-negara di dunia. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut setiap negara perlu melakukan perbaikan terhadap kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Secara umum, masalah lingkungan sering dikaitkan dengan proses pembangunan dan oleh karena itu dapat berdampak pada tingkat lokal, regional, maupun global. Beberapa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia ini telah menghancurkan konsekuensi terhadap lingkungan dan sangat berbahaya bagi manusia, hewan dan tumbuhan dan dapat diteruskan ke generasi mendatang (Chi, 1998; Kjellstrom & Mercado, 2008). Dalam menghadapi resesi ekonomi global, degradasi lingkungan merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan (Anbumozhi & Bauer, 2010).

Banyak laporan United Nations tentang pembangunan berkelanjutan, yang terakhir adalah laporan United Nations (2010), yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian individu lain, menganggap konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.



Gambar 3.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Stevens (2005)

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (Gambar 2). Sejalan dengan itu, dalam laporan United Nations (2010) menyebutkan ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual (Hedlund-de Witt, 2014; Ruttenberg, 2013). Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Secara konsep, pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan adalah konsep yang berbeda. Terdapat dua kriteria utama pembangunan berkelanjutan, (i) keberlanjutan yang lemah (*Weak*

Sustainability); (ii) keberlanjutan yang kuat (*Strong Sustainability*), kriteria tersebut merupakan ide dalam ekonomi yang dipelopori oleh Solow (1986) dan Hartwick (1977). Keberlanjutan yang lemah (*Weak Sustainability*) merupakan ide dalam ekonomi lingkungan, yang mengasumsikan bahwa modal manusia (*human capital*) dapat menggantikan modal alam (*natural capital*). Sedangkan istilah keberlanjutan yang kuat (*Strong Sustainability*) mengasumsikan bahwa modal manusia (*human capital*) dan modal alam (*natural capital*) saling melengkapi, namun tidak dapat dipertukarkan. Dalam literatur ekonomi, kriteria pendekatan keberlanjutan yang lemah juga digunakan dalam studinya Amsalu *et al.* (2014) mengamati sumber daya yang langka dengan menggunakan alternatif.

Pemahaman terhadap elemen pembangunan berkelanjutan dapat dimasukkan sebagai input produktif. Input produktif inilah yang dapat digunakan dalam proses produksi, yang nantinya mendorong ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan dan secara luas input tersebut dapat dikategorikan sebagai; (i) tanah (semua sumber daya alam atau modal); (ii) tenaga kerja (energi, jam kerja, aspek modal manusia), dan (iii) modal (modal kerja dan nyata, modal keuangan, modal produksi, dan lain-lain.)

Menurut Seidler & Bawa (2010) sebagian besar ekonom neoklasik melihat hal tersebut, terutama yang mengadopsi fungsi produksi Cobb-Douglas yang terkenal pada tahun 1928, di mana dalam pemahamannya menganggap ada faktor substitusi dalam fungsi produksi (Felipe & Adams, 2005). Keterkaitan elemen pembangunan berkelanjutan ini dijelaskan kembali oleh Stevens (2005) seperti yang

disajikan pada Gambar 2, uraian elemen tersebut disajikan seperti berikut ini:

- (1) Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap lingkungan (misalnya penggunaan sumber daya dan emisi CO₂).
- (2) Jasa lingkungan untuk ekonomi (misalnya, sumber daya alam, kontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan lapangan kerja).
- (3) Layanan lingkungan kepada masyarakat (misalnya, akses terhadap sumber daya dan fasilitas, kontribusi terhadap kondisi kesehatan, kehidupan dan kondisi kerja).
- (4) Pengaruh variabel sosial terhadap lingkungan (misalnya, perubahan demografis, pola konsumsi, pendidikan lingkungan dan informasi, kerangka kelembagaan dan hukum).
- (5) Pengaruh variabel sosial terhadap ekonomi (misalnya, angkatan kerja, populasi dan struktur rumah tangga, pendidikan dan pelatihan, tingkat konsumsi, kerangka kelembagaan dan hukum).
- (6) Dampak aktivitas ekonomi terhadap masyarakat (misalnya, tingkat pendapatan, ekuitas, pekerjaan).

Berdasarkan pemahaman tersebut, terlihat bahwa peran modal manusia bersifat sakral bahkan bagi ekosistem untuk bertahan hidup, menghasilkan output ekonomi, dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dari pilar dan interaksi mereka seperti yang diamati sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi apapun.

Di sisi lain, terdapat juga istilah pembangunan hijau (*green development*), ini berbeda dengan pembangunan berkelanjutan, di

mana pembangunan hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya (Hu, 2017; Kasztelan, 2017). Pendukung pembangunan berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh di mana pemikiran mutakhir dari pembangunan hijau sulit diwujudkan.

Studi yang dilakukan oleh Basiago (1999) melihat adanya tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan, hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi pihak swasta (*private firms*) untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Di lain pihak, menurut Elliott (2006) dan Sexton *et al.* (2008) pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, di mana pandangan yang luas berada di bawah naungannya, konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekologi secara mendalam. Konsep yang berbeda juga menunjukkan adanya tarik ulur yang kuat antara ekonomi lingkungan dan antropologi. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya (Elliott, 2006; Sexton *et al.*, 2008). Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang dipahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan matrik dan indikator keberlanjutan.

Selain itu, populasi merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran populasi sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan.

Jumlah populasi yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah dapat memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen-komponen penduduk yang berkualitas, karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (Scidler & Bawa, 2010). Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

4. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Strategi dan kebijakan dalam mengejar pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan lingkungan ini sebenarnya masih relatif banyak. Berjalannya kebijakan secara baik tergantung dari inisiatif dan inovasi dari pembuat kebijakan yang mengarahkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, hal tersebut dapat berjalan baik melalui koordinasi antar pihak terkait dan meninjau secara rutin saat kebijakan pembangunan di implementasikan. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat menyeimbangkan keberadaan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Menurut Olson (1983) menjelaskan bahwa yang menjadi alasan dasar dari pembangunan berkelanjutan antara lain:

- (1) Persoalan lingkungan merupakan hal yang saling terkait satu sama lain;
- (2) Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan merupakan dua hal pokok yang saling berkaitan. Proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan mengawali integrasi yang terjadi antara lingkungan dan ekonomi;
- (3) Pentingnya kerjasama dan komunikasi internasional diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem yang tidak mempedulikan batas-batas negara;
- (4) Masalah ekonomi dan lingkungan juga berhubungan dengan faktor sosial dan politik.

Kebijakan pembangunan harus mengidentifikasi prioritas, hambatan, dan hambatan untuk melawan degradasi dan jika mungkin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tersebut. Menurut Salim (2010) konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penjelasan Salim (2010) yang menegaskan bahwa terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yakni:

- (1) Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa.

- (2) Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
- (3) Mengedepankan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
- (4) Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.

Kebijakan perencanaan pembangunan yang baik perlu mengedepankan aspek lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, karena untuk mewujudkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperlukan beberapa hal yang harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan antara lain:

- (1) Kebijakan perencanaan pembangunan dengan prinsip mencapai keseimbangan dinamis antara pemenuhan kebutuhan dan kelestarian lingkungan;
- (2) Memperhatikan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan, dengan menekan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya;
- (3) Eksploitasi sumber daya alam didasarkan pada prinsip keberlanjutan atau kelestarian lingkungan;
- (4) Mendorong kebijakan politik lingkungan yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang;
- (5) Memperhatikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2010). Globalization, Poverty and Environmental Degradation: Sustainable Development in Pakistan. *Journal of Sustainable Development*, 3(3), 103–114. <https://doi.org/10.5539/jsd.v3n3p103>
- Amsalu, D. W., Jacobsen, J. B., & Lundhede, T. H. (2014). Economic assessment of use values of near-natural forestry compared with rotational forestry in Denmark. *European Journal of Forest Research*, 133(4), 611–622. <https://doi.org/10.1007/s10342-014-0789-3>
- Anbumozhi, V., & Bauer, A. (2010). Impact of Global Recession on Sustainable Development and Poverty Linkages. In *Working Paper* (Issue 227, pp. 1–21). ADB Institute.
- Andreoni, J., & Levinson, A. (2001). The simple analytics of the environmental Kuznets curve. *Journal of Public Economics*, 80(2), 269–286. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(00\)00110-9](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00110-9)
- Basiago, A. D. (1999). Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice. *The Environmentalist*, 19, 145–161. <https://doi.org/10.1023/A:1006697118620>
- Brundtland, G. H. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. In *Report of United Nations*. United Nations. <https://doi.org/10.2307/2621529>
- Chi, A. (1998). Human interference and environmental instability:

- addressing the environmental consequences of rapid urban growth in. *Environment and Urbanization*, 10(2), 161–174. <https://doi.org/10.1630/095624798101284527>
- Eidelwein, F., Cisco, D., Henrique, L., Pacheco, D., & Sartori, F. (2018). Internalization of environmental externalities: Development of a method for elaborating the statement of economic and environmental results. *Journal of Cleaner Production*, 170, 1316–1327. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.208>
- Elliott, J. A. (2006). An introduction to sustainable development: The developing world. In J. A. Elliott (Ed.), *Routledge Taylor & Francis Group* (3rd Editio). Routledge Taylor & Francis Group. [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(96\)90049-2](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(96)90049-2)
- Felipe, J., & Adams, G. F. (2005). A Theory of Production. The estimation of the Cobb-Douglas function: a retrospective view. *Eastern Economic Journal*, 31(3), 427–445. <https://doi.org/>
- Guo, L., & Ma, H. (2008). Conflict between Developing Economic and Protecting Environment. *Journal of Sustainable Development*, 1(3), 91–97.
- Hartwick, J. M. (1977). Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources. *American Economic Review*, 67(5), 972–974. <https://doi.org/10.2307/1828079>
- Hedlund-de Witt, A. (2014). Rethinking sustainable development: Considering how different worldviews envision “development” and “quality of life.” *Sustainability (Switzerland)*, 6(11), 8310–8328. <https://doi.org/10.3390/su6118310>

- Hu, A. (2017). China: Innovative green development. *China: Innovative Green Development*, VIII(239), 15–56. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-54962-5>
- Kasztelan, A. (2017). Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse. *Prague Economic Papers*, 26(4), 487–499. <https://doi.org/https://doi.org/10.18267/j.pep.626>
- Kjellstrom, T., & Mercado, S. (2008). Towards action on social determinants for health equity in urban settings. *Environment and Urbanization*, 20(2), 551–574. <https://doi.org/10.1177/0956247808096128>
- Mason, R., & Swanson, T. (2002). The costs of uncoordinated regulation. *European Economic Review*, 46(1), 143–167. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00087-3](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00087-3)
- Misra, A. K. (2014). Climate change and challenges of water and food security. *International Journal of Sustainable Built Environment*, 3(1), 153–165. <https://doi.org/10.1016/j.ijbsbe.2014.04.006>
- Olson, R. K. (1983). Resources, environment and population. The Global Tomorrow Coalition Conference. *Mazingira*, 7(3), 46–53.
- Panayotou, T. (2003). Economic Growth and the Environment. In *Economic Survey of Europe* (pp. 45–72). [https://doi.org/10.1016/S1574-0099\(05\)03023-8](https://doi.org/10.1016/S1574-0099(05)03023-8)
- Patz, J. A., Githeko, A. K., McCarty, J. P., Hussein, S., Confalonieri, U., & De Wet, N. (2003). Climate change and infectious diseases. In A. J. McMichael, D. H. Campbell-Lendrum, C. F. Corvalán, K. L. Ebi, A. K. Githeko, J. D. Scheraga, & A.

- Woodward (Eds.), *Climate Change and Human Health: Risks and Responses* (pp. 103–127). World Health Organization. <https://doi.org/10.2307/2137486>
- Pindyck, R. S. (2013). Climate Change Policy: What Do the Models Tell Us? *NBER Working Paper Series*, 51(3), 1–23. <https://doi.org/10.1257/jel.51.3.860>
- Rees, J. (1990). *Natural Resources: Allocation, Economics and Policy* (2nd ed.). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Ruttenberg, T. (2013). Wellbeing Economics and Buen Vivir: Development Alternatives for Inclusive Human Security. *PRAXIS The Fletcher Journal of Human Security*, 28(2013), 68–93.
- Salim, E. (2010). Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. In I. J. Azis, L. M. Napitupulu, A. A. Patunru, & B. P. Resosudarmo (Eds.), *Pembangunan Berkelanjutan* (1st ed., pp. 978–979). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Seidler, R., & Bawa, K. S. (2010). Dimensions of sustainable development. In K. S. Bawa & R. Seidler (Eds.), *Encyclopedia of Life Support Systems* (1st ed.). EOLSS Publications.
- Sexton, M., Barrett, P., & Lu, S.-L. (2008). The evolution of sustainable development. In *The Routledge Handbook of Tourism and the Environment* (pp. 185–207). University of Salford.
- Solow, R. M. (1986). On the intergenerational allocation of exhaustible resources. *The Scandinavian Journal of Economics*, 88(1), 141–149.
- Sorrell, S. (2010). Energy, economic growth and environmental

- sustainability: Five propositions. *Sustainability*, 2(6), 1784–1809.
<https://doi.org/10.3390/su2061784>
- Stevens, C. (2005). Statistics Brief: Measuring Sustainable Development. In C. Aspden, B. Arnaud, E. Capponi, & J. Dupont (Eds.), *Organisation for Economic Cooperation and Development* (Issue 10). OECD Publishing.
- Implementation of Agenda 21: Resolution adopted by the General Assembly, Pub. L. No. A/RES/64/236, United Nations Report I (2010).
- United Nations. (2015). *General Assembly of the United Nations. Sustainable Development*. New York: United Nations.

PROFIL PENULIS



Sri Andaryani, S.E., M.S.E.
 Lahir tanggal 27 Januari 1993
 D1: Universitas Swadaya (2016)
 D2: Universitas Indonesia (2018)
 Bidang Kajian Utama: Ekonomi Moneter
 Mengampu Mata Kuliah Ekonomi Moneter
 Monev, Ekonomi, Ekonomi
 Pengantar Ekonomi Mikro dan Pengantar
 Ekonomi Makro, Pemasaran, Keuangan LPDP
 Tahun 2018



Drs. Bambang Setiyo S. M.A., Ph.D.
 Lahir tanggal 10 Juni 1963
 D1: Universitas Swadaya (1991)
 D2: PU Aruk (1998)
 D3: UIN Mataram (2019)
 Bidang Kajian Utama: Ekonomi SDM dan
 Ketenagakerjaan
 Mengampu Mata Kuliah Ekonomi
 Pembangunan, Ekonomi Ketenagakerjaan,
 dan Investasi SDM



Dr. M. Subardin, S.E., M.Si.
 Lahir tanggal 28 November 1971
 D1: Universitas Swadaya (1996)
 D2: Universitas Swadaya (2004)
 D3: Universitas Swadaya (2018)
 Bidang Kajian Utama: Ekonomi SDG dan
 Ekonomi Pertanian
 Mengampu Mata Kuliah Ekonomi Pertanian,
 Pengantar Ekonomi Mikro, dan Ekonomi
 Koperasi



Ardiaksh Hidayat, S.E., M.Si.
 Lahir tanggal 11 September 1979
 D1: Universitas Swadaya (1999)
 D2: Universitas Swadaya (2004)
 Bidang Kajian Utama: Ekonomi Moneter
 Mengampu Mata Kuliah Ekonomi Moneter 1
 Dan 2, Kewirausahaan, Ekonomi Pertanian,
 Ekonomi Koperasi



Dita Pratama Ariyanti, S.E., M.Si.
 Lahir tanggal 23 September 1999
 D1: Ekonomi Pembangunan UIN (2009)
 D2: Ilmu Ekonomi UIN (2011)
 Bidang Kajian Utama: Ekonomi Gender
 Daya Manusia (SDM)
 Mengampu Mata Kuliah Ekonomi
 Pembangunan, Ekonomi Ketenagakerjaan,
 dan Kewirausahaan
 Sebagai Ketua Unit Penelitian dan
 Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM FE
 UIN Tahun 2020



Ichsan Hamidi, S.H., M.Si.
 Lahir tanggal 01 Mei 1991
 D1: Institut Studi Islam Darussalam Gombak
 (2008)
 D2: Universitas Swadaya (2018)
 Bidang Kajian Utama: Ekonomi Syariah
 Mengampu mata kuliah Ekonomi Islam,
 Hukum Perbankan Syariah, Fiqh Muamalah,
 Keuangan Islam dan Bahasa Arab

Deasy Agriani, S.E., M.Si.
 lahir tanggal 3 April 1991
 D1: Universitas Swadaya (2013)
 D2: Universitas Swadaya (2017)
 Bidang Kajian Utama: Ekonomi
 Industri
 Mengampu Mata Kuliah Ekonomi
 Islam, Ekonomi Industri, Ekonomi
 State Aid, Ketenagakerjaan



Haniha, S.E.
 lahir tanggal 21 Januari 1997
 D1: Universitas Swadaya (2019)
 Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu
 Ekonomi tahun 2019
 Konsentrasi: Ekonomi Industri



Anggita Feisabella Rizanti, S.E.
 Lahir tanggal 18 Agustus 1998
 D1: Universitas Swadaya (2020)
 Konsentrasi: Ekonomi Keuangan
 Daerah



Mega Debiyanti, S.E.
 Lahir tanggal 10 Januari 1998
 D1: Universitas Swadaya (2020)
 Konsentrasi: Ekonomi Regional



Nadlya Anggrini
 Lahir tanggal 27 November 1999
 Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
 tahun 2017
 Konsentrasi: Ekonomi Keuangan
 Daerah



Rumia Sari
 Lahir tanggal 1 Maret 2000
 Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
 tahun 2017
 Konsentrasi: Ekonomi Keuangan
 Daerah



Profil Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis

Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis berfokus pada pengembangan keilmuan ekonomi dan bisnis serta pengabdian masyarakat. Laboratorium ini menyelenggarakan kegiatan praktikum reguler, program pelatihan opsional dan pengembangan, dan atau konsultasi di bidang ekonomi dan bisnis, baik bagi kalangan internal (dosen dan mahasiswa) maupun eksternal (pelaku bisnis, pemerintahan). Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis mempunyai tugas melakukan kegiatan yaitu menunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sriwijaya. Adapun fungsi dari Laboratorium

Aplikasi Ekonomi dan Bisnis memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan praktikum untuk pembelajaran dan pengembangan aplikasi ekonomi dan bisnis yang terkait dengan mata kuliah inti;
- Menyediakan data dan informasi ekonomi dan bisnis;
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait dengan aplikasi ekonomi dan bisnis; dan
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis.

PROFIL PENULIS



Prof. Bernadette Robiani, M.Sc.
Lahir pada tanggal 10 Februari 1964
S1: Universitas Sriwijaya (1987)
S2: University of Mary (1987)
S3: Universitas Padjadjaran (2002)
Bidang Kajian Utama: Ekonomi Industri
Mengampu Mata Kuliah: Ekonomi Industri 1 dan 2, Ekonomi Skala Kecil dan Ekonomi Mikro



Dr. Azwardi, S.E., M.Si.
Lahir pada tanggal 19 Mei 1968
S1: Universitas Sriwijaya
S2: Universitas Syiah Kuala (1996)
S3: Universitas Padjadjaran (2007)
Bidang Kajian Utama: Ekonomi Keuangan Daerah dan Regional
Mengampu Mata Kuliah: Ekonomi Mikro dan Makro, Keuangan Daerah, Pembangunan dan KD, dan Ekonomi Publik dan E
Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Sejak Tahun 2020-Sekarang



Dr. Sohel, S.E., M.Si.
Lahir tanggal 14 Oktober 1965
S1: Universitas Jember (Sedimentasi) (1988)
S2: Universitas Syiah Kuala (1998)
S3: Universitas Padjadjaran (2013)
Bidang Kajian Utama: Ekonomi Syariah
Mengampu Mata Kuliah: Kewirausahaan, Ekonomi Skala Kecil, Ekonomi Industri dan Ekonomi Islam



Dr. Yurkivita, S.E., M.Si.
Lahir pada tanggal 29 Juni 1970
S1: Universitas Sriwijaya (1994)
S2: Universitas Sriwijaya (2005)
S3: Universitas Sriwijaya (2016)
Bidang Kajian Utama: Ekonomi SDM dan Kewirausahaan
Mengampu mata kuliah: Ekonomi Kewirausahaan 1 dan 2, Analisis Pasar Tenaga Kerja, Statistik Ekonomi, dan Ekonomi Makro
Sebagai Pengajar UAT Padjadjaran Mata PEGUJRI

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
Lahir tanggal 8 April 1973
S1: Universitas Sriwijaya (1997)
S2: Universitas Sriwijaya (2004)
S3: Universitas Sriwijaya (2018)
Bidang Kajian Utama: Ekonomi Industri dan Agribisnis
Mengampu Mata Kuliah: Ekonomi Industri 1 dan 2 dan Ekonomi Skala Kecil
Sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya (2018-sekarang)



Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
Lahir di pada tanggal 25 Maret 1974
S1: Universitas Sriwijaya (2005)
S2: Universitas Sriwijaya (2007)
S3: Institut Perikanan Bogor (2010)
Bidang Kajian Utama: Ekonomi Regional
Mengampu Mata Kuliah: Ekonomi Regional, Ekonomi Pedesaan, Ekonomi Publik dan Ekonomi Perikanan
Sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Sejak Tahun 2019-sekarang



Imelda, S.E., N.S.E.
Lahir tanggal 9 Maret 1977
S1: Universitas Sriwijaya (1995)
S2: Universitas Indonesia (2003)
Bidang Kajian Utama: Ekonomi Regional dan Perikanan
Mengampu Mata Kuliah: Perencanaan Pembangunan, Kebijakan Ekonomi Regional, Ekonomi Perikanan, Ekonomi Regional dan Ekonomi SDAL
Sebagai Kepala Laboratorium Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Sejak Tahun 2019-Sekarang



Dr. Abdul Basir, S.E., M.Si.
Lahir pada tanggal 12 Juli 1985
S1: Universitas Sriwijaya (2008)
S2: Universitas Sriwijaya (2011)
S3: Universitas Sriwijaya (2023)
Bidang Kajian Utama: Mengampu Mata Kuliah: Ekonomi Makro, Ekonomi Publik, Ekonomi Keuangan Daerah, Ekonomi SDAL, Saat ini Sebagai: Co-Editor in Chief di Jurnal Ekonomi Pembangunan, dan Editor in Chief Di Jurnal Glimmer



Book Chapter_Lingkungan

ORIGINALITY REPORT

12%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ hdr.undp.org
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%